

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Agama memiliki peran signifikan dalam membangun peradaban umat manusia. Hampir tidak ada peradaban besar dunia yang terbentuk tanpa campur tangan agama di dalamnya. Faktanya, ide-ide keagamaan yang tersurat dalam kitab suci keagamaan menjadi spirit suci yang memberikan energi besar bagi transformasi kehidupan masyarakat (Sutrisno, 2018:8). Kepercayaan terhadap agama yang bersumber dari wahyu Tuhan membentuk sistem nilai dan gagasan yang terinternalisasi dalam diri sehingga menjadi landasan motivasional bagi perilaku individu dan masyarakat (Aziz, 2006:123).

Menurut Utama (2013:2—3), agama memberikan tuntunan kepada manusia dalam menjalani kehidupan di dunia untuk mewujudkan kebahagiaan jasmani (duniawi) dan rohani (surgawi). Tujuan hidup ini penting diketahui karena akan menjadi landasan manusia dalam menjalani aktivitasnya. Agama sebagai sistem keyakinan dapat menjadi bagian sistem nilai budaya masyarakat sehingga agama dapat berperan sebagai pendorong, penggerak, dan pengontrol tindakan para anggota masyarakat agar tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai budaya dan agamanya. Keutamaan agama sebagai sumber moral karena ia tidak mungkin mengandung kesalahan-kesalahan atau keburukan-keburukan yang menyebabkan manusia bertindak kontraproduktif bagi kesempurnaan hidupnya. Ringkasnya, agama sebagai pedoman menuju kesempurnaan hidup layak diperebutkan dan diperjuangkan dalam segala lini kehidupan. Dengan demikian, agama akan benar-benar menjadi milik masyarakat.

Secara sosiologis, agama dalam realitas sosial senantiasa bersentuhan dengan pemenuhan kebutuhan hidup manusia, baik yang bersifat fisik, biologis, sosial, ekonomi, politik, maupun kebutuhan integratif, yaitu keinginan hidup beradab, bermoral, tenteram, dan damai. Agama mempunyai pengaruh dalam mendorong individu untuk melakukan suatu aktivitas karena perbuatan yang dilakukan berdasarkan agama dinilai memenuhi unsur kesucian dan ketaatan. Sementara itu, agama sebagai nilai etik mampu membimbing manusia untuk bertindak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku sehingga agama menjadi etos kerja masyarakat pemeluknya. Nilai etik agama menjadikan orang merasa berkewajiban untuk menaati aturan-aturan ataupun perundang-undangan yang berlaku, memenuhi kewajiban membayar utang dan pajak, serta mendorong orang untuk memberikan sedekah (*dana punia*) kepada orang lain yang membutuhkan (Utama, 2013:14—15).

Mengingat sangat pentingnya peran agama bagi masyarakat, Maman dkk. (2006:2) mengimbau agar pembangunan, pembinaan, pelestarian, dan pengembangan agama dijadikan agenda penting dan niscaya karena agama terbukti mempunyai peran transformatif dan motivator proses sosial, kultural, ekonomi, dan politik masa depan. Selain itu, rekonstruksi sosial berdasarkan idola-idola agama mendapatkan makna pentingnya agar kemajuan yang dicapai masyarakat tidak malah menciptakan kondisi dehumanisasi dan barbarisme etik (Radhakrishnan, 2003:5). Berkenaan dengan itu, Triguna (2011:4) menyatakan bahwa arah dan pola pengembangan agama ke depan hendaknya lebih memberikan peluang bagi berkembangnya nilai-nilai konstitusionalisme dan demokrasi agar keberadaan agama tetap sejalan dengan semangat zaman.

Harus diakui bahwa peran agama dalam kehidupan sosial dewasa ini belum mampu menciptakan kondisi ideal yang diharapkan. Degradasi moral, kesenjangan ekonomi, dan persoalan-persoalan kemanusiaan lainnya membuktikan bahwa umat beragama masih belum mampu menjadikan agama sebagai spirit kehidupan untuk mewujudkan kesejahteraan hidup lahir dan batin. Hal ini senada dengan pernyataan Effendi (2008:xiii) bahwa nilai-nilai luhur berbagai agama sekarang ini menghadapi berbagai tantangan, seperti krisis nilai, proses dehumanisasi, dan ketidakpastian masa depan.

Agama Hindu secara tegas menyatakan bahwa tujuan hidup manusia adalah mencapai kebahagiaan duniawi dan rohani berdasarkan kebenaran atau *dharma (moksartham jagadhita ya ca iti dharma)*. Artinya, ajaran agama Hindu tidak hanya berkaitan dengan persoalan-persoalan yang bersifat teologis-metafisis, tetapi juga menyangkut kehidupan aktual sehari-hari umatnya. Keduanya harus berjalan bersamaan dan saling terintegrasi satu sama lain demi terwujudnya tujuan hidup manusia secara utuh dan menyeluruh. Hal ini lebih tegasnya dapat disimak dalam *Rig Weda II.21.6*, sebagai berikut.

*Indre srestani dravinani dhehi,  
cittim daksasya subhaga tvam asme,  
posam rayonam aristhi tanunam,  
svadmanam vacah sudinatvam ahnam.*

Terjemahannya:

O Indra, karunialah kami kekayaan yang mulia,  
pikiran yang baik, dan kemuliaan spiritual,  
harta benda yang berlipat ganda, kesehatan jasmani,  
suara yang merdu, serta hari-hari yang cerah.

*Mantra* di atas menunjukkan bahwa kehidupan yang sejahtera secara material, seperti memiliki kekayaan, harta benda, kesehatan, dan kenikmatan duniawi lainnya patut diupayakan. Kendatipun demikian, kesejahteraan duniawi

tersebut harus tetap diimbangi dengan kemuliaan moral dan spiritual sehingga akan terwujud kebahagiaan lahir dan batin. Apabila ajaran ini dijadikan sebagai pedoman atau jalan hidup (*way of life*), sepatutnya umat Hindu terhindar dari kemiskinan, baik secara material, moral, maupun spiritual. Oleh karena itu, menjadi sebuah problematika ketika masih terdapat umat Hindu yang hidup dalam kondisi kemiskinan. Artinya, terjadi kesenjangan antara agama sebagai teks ideal dengan implementasinya dalam kehidupan aktual.

Fenomena ini salah satu di antaranya juga muncul di Kabupaten Karangasem yang mayoritas penduduknya beragama Hindu. Berdasarkan data *Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Tahun 2018*, diketahui bahwa Kabupaten Karangasem menempati posisi teratas jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali dengan persentase sebesar 6,55 % dari jumlah penduduk. Mirisnya lagi, peringkat teratas ini disandang secara berturut-turut setidaknya-tidaknya dalam lima tahun terakhir sebagaimana tampak dalam tabel 1.1 di bawah ini.

Tabel 1.1  
Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Bali Tahun 2013 – 2017

No	Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin dari Jumlah Penduduk (%)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Karangasem	6,88	7,30	7,44	6,61	6,55
2	Klungkung	7,01	7,01	6,91	6,35	6,29
3	Buleleng	6,31	6,79	6,74	5,79	5,74
4	Jembrana	5,56	5,83	5,84	5,33	5,38
5	Bangli	5,45	5,86	5,73	5,22	5,23
6	Tabanan	5,21	5,61	5,52	5,00	4,92
7	Gianyar	4,27	4,57	4,61	4,44	4,46
8	Denpasar	2,07	2,21	2,39	2,15	2,27
9	Badung	2,46	2,54	2,33	2,06	2,06

Sumber: Diolah dari data *Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Tahun 2018*

Tabel 1.1 di atas mengisyaratkan bahwa pengentasan kemiskinan di Kabupaten Karangasem masih menjadi persoalan serius yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat. Kesulitan dalam pengentasan kemiskinan tersebut tidak lepas dari penyebab terjadinya kemiskinan itu sendiri memang sangat kompleks. Hal ini dapat dirujuk pada kajian Hadiwigeno dan Pakpahan (1993) tentang penyebab kemiskinan ekonomi di Indonesia dari berbagai aspek seperti berikut.

- (1) Sumber daya alam, meliputi lahan yang kurang subur, pendayagunaan lahan kurang, dan adanya degradasi lahan.
- (2) Teknologi dan unsur pendukungnya, meliputi aplikasi teknologi rendah, ketersediaan sarana produksi terbatas, dan hama penyakit.
- (3) Sumber daya manusia, meliputi tingkat pendidikan rendah, produktivitas tenaga kerja rendah, tingkat kesehatan masyarakat rendah, adanya tradisi yang menghambat, dan lapangan kerja yang terbatas.
- (4) Sarana, prasarana, dan kelembagaan, meliputi daerah terisolasi, modal terbatas, kelembagaan sarana pembangunan pertanian kurang/tidak berfungsi, irigasi terbatas, pemilikan lahan sempit, bagi hasil yang tak adil, dan tingkat upah rendah.

Faktor sumber daya alam memang menjadi salah satu penyebab terjadinya kemiskinan ekonomi di Kabupaten Karangasem karena sebagian wilayahnya didominasi lahan kritis dan tandus, terutama di wilayah bagian utara dan timur. Kurangnya pemanfaatan lahan pertanian yang produktif oleh masyarakat sehingga pertanian tidak berkembang dengan baik. Padahal sebagian besar penduduknya menjadikan pertanian dan perkebunan sebagai mata pencaharian sehari-hari. Kondisi ini berkaitan juga dengan faktor sumber daya manusia yang masih rendah dalam hal teknologi pertanian ditambah lagi dengan kurangnya minat masyarakat menjadi petani yang diasumsikan sebagai pekerjaan berat dan hasil tidak banyak. Hal ini mengindikasikan bahwa orientasi nilai, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap pertanian masih negatif, padahal sarana dan

prasarana, seperti pasar tradisional, infrastruktur jalan, saluran irigasi, teknologi pertanian, dan sebagainya sudah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Karangasem untuk meningkatkan produksi dan mendistribusikan hasil-hasil pertanian masyarakat.

Persoalan sumber daya manusia (SDM) merupakan penyebab kemiskinan di Kabupaten Karangasem. Tingkat pendidikan masyarakat masih tergolong rendah karena sekitar 40,10 % penduduknya tidak tamat pendidikan dasar. Infrastruktur pendidikan yang kurang memadai dan kurang jumlah terutama terjadi di Kecamatan Kubu, Abang, Rendang, dan Desa Seraya (*Karangasem dalam Angka 2017*). Minimnya lapangan pekerjaan mendorong sebagian masyarakatnya bekerja ke luar Kabupaten Karangasem dengan upah rendah. Sebaliknya, penduduk yang tetap menekuni pekerjaan di desa umumnya memiliki pendapatan rata-rata kurang dari 1,7 juta per bulan. Fakta ini didukung oleh data Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun 2017 bahwa terdapat 40.272 KK atau 39,13 % penduduk miskin di wilayah Kabupaten Karangasem terutama di Kecamatan Karangasem (khususnya Desa Seraya), Kubu, Abang, dan Bebandem (*Dinas Sosial Kabupaten Karangasem Tahun 2017*).

Selain penyebab kemiskinan tersebut, Effendi (1995) mengemukakan beberapa penyebab kemiskinan sosial, yaitu kemiskinan karena faktor-faktor yang bersifat menghambat seseorang untuk memanfaatkan peluang-peluang yang tersedia. Faktor-faktor penghambat tersebut dapat dibagi menjadi dua, yaitu (1) faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang dan (2) faktor-faktor yang

berasal dari luar diri seseorang. Kedua faktor ini dapat diuraikan lebih jelas sebagai berikut.

*Pertama*, faktor-faktor dari dalam diri seseorang atau sekelompok orang mencakup rendahnya tingkat pendidikan dan hambatan budaya. Kemiskinan dapat muncul karena nilai-nilai kebudayaan yang dianut oleh sekelompok orang itu sendiri. Kemiskinan ini muncul karena sekelompok masyarakat tidak terintegrasi dengan masyarakat luas, apatis, pragmatis, cenderung menyerah pada nasib, tingkat pendidikan rendah, tidak mempunyai daya juang, dan kurang memikirkan masa depan. Kondisi inilah yang disebut kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang bertalian erat dengan kebudayaan masyarakat sehingga acap kali terwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya (Lewis, dalam Effendi, 1995). *Kedua*, faktor-faktor dari luar kemampuan seseorang, seperti birokrasi atau peraturan-peraturan yang dapat menghambat seseorang untuk memanfaatkan kesempatan yang ada. Kemiskinan sosial seperti ini disebut dengan kemiskinan struktural. Kemiskinan ini terjadi karena memang ada hambatan-hambatan struktural yang dihadapi seseorang atau masyarakat, bukan karena seseorang malas bekerja. Dengan demikian, kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial menghambat masyarakat untuk memanfaatkan sumber-sumber pendapatan yang tersedia. Kemiskinan struktural terutama disebabkan oleh kurangnya fasilitas, seperti permukiman, pendidikan, kesehatan, akses komunikasi ke luar, dan perlindungan hukum serta kebijakan politik pemerintah.

Sejalan dengan pendapat di atas, kemiskinan merupakan kondisi yang menyebabkan seseorang atau kelompok masyarakat dalam suatu wilayah tidak memiliki kemampuan untuk mencukupi kebutuhan dasarnya sesuai dengan tata nilai atau norma tertentu yang berlaku (Tim Penyusun, 2013:4). Kemiskinan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu (1) kemiskinan natural atau alamiah, yakni kemiskinan yang disebabkan oleh keterbatasan kualitas sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM); (2) kemiskinan stuktural, merupakan kemiskinan yang diakibatkan oleh faktor-faktor struktural, yakni ketidakmampuan sistem dan struktur sosial dalam menyediakan kesempatan-kesempatan bagi orang miskin untuk mendapatkan penghasilan. Struktur sosial tidak mampu menghubungkan

masyarakat dengan sumber-sumber yang tersedia, baik alam, pemerintah, maupun masyarakat sekitarnya; dan (3) kemiskinan kultural, yakni kemiskinan yang disebabkan oleh nilai/pola pikir, sikap, dan perilaku yang dianut oleh masyarakat, seperti sikap pasrah, malas, pragmaris, perilaku hidup boros, tingkat pendidikan rendah, tidak cakap bekerja, ketergantungan dan apatis/cuek merasa nyaman dengan kemiskinannya (Tim Penyusun, 2013:4—5).

Berdasarkan ketiga jenis kemiskinan tersebut diketahui bahwa masalah kemiskinan melibatkan multifaktor yang berkaitan satu sama lain. Penelusuran/ penelitian awal di lapangan menunjukkan bahwa dari ketiga bentuk kemiskinan tersebut tampaknya fenomena kemiskinan kultural cukup dominan terjadi di Kabupaten Karangasem. Artinya dengan kondisi alam yang sama pada satu wilayah yang mayoritas penduduknya miskin, juga ditemukan penduduk yang secara ekonomi cukup berhasil. Hal ini menegaskan bahwa kondisi alam bukan faktor dominan penyebab kemiskinan, melainkan lebih kepada orientasi nilai, sikap, dan perilaku setiap orang.

Kemiskinan tidak semata-mata disebabkan oleh keterbatasan akses ekonomi, pasar, dan literasi, tetapi juga disebabkan oleh nilai-nilai, pandangan hidup, dan norma-norma yang dianut oleh masyarakat. Hal ini ditegaskan oleh Gunawan (2010) bahwa persepsi, emosi, keyakinan, pendapat, dan perilaku didasari oleh kepercayaannya (*belief*). Oleh karena itu, penting untuk membangun sebuah kepercayaan yang positif dalam hidup sehingga dapat meneguhkan pikiran seseorang. Hal itu penting karena dengan pikirannya, manusia dapat menentukan masa depan atau nasibnya, memahami masalah, dan mencari solusinya. Pikiran merupakan alat yang luar biasa bagi manusia untuk mencapai segala sesuatu yang



diinginkan sehingga penting menggunakan pikiran untuk mengubah kehidupan ke arah yang lebih baik.

Kemiskinan kultural yang bertalian erat dengan nilai/kepercayaan, sikap, dan perilaku seseorang dalam menyikapi permasalahan keterbatasan ekonomi yang dihadapi tampaknya menjadi hambatan terbesar dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Karangasem. Untuk memfokuskan permasalahan maka kemiskinan kultural dalam penelitian ini memfokuskan pada tiga ranah yaitu ranah individual, keluarga, dan sosial. *Pertama*, pada ranah individual, kemiskinan kultural dilihat pada tiga aspek, yaitu (1) aspek nilai ditandai dengan pasrah menerima takdir yakni pola pikir yang menganggap bahwa miskin sudah kehendak Tuhan/takdir; (2) aspek sikap ditandai dengan apatis dan pragmatis yakni sikap cuek dan ingin mendapatkan sesuatu dengan mudah dan cepat; dan (3) aspek perilaku ditandai dengan ketergantungan pada bantuan pihak lain yakni kondisi kemiskinan dianggap memberikan keuntungan untuk mendapatkan bantuan atau asupan program dari pemerintah. *Kedua*, pada ranah keluarga, kemiskinan kultural dapat dilihat pada (1) lemahnya perencanaan keluarga yang ditandai dengan jumlah anggota keluarga yang besar dan perkawinan usia dini; (2) mengandalkan pekerja perempuan sebagai tulang punggung keluarga, sedangkan suami atau pihak laki-laki hanya berdiam diri dan bersenang-senang, seperti *metukan* dan *ketajen*; dan (3) penyimpangan pola konsumsi yang memiliki cenderung membelanjakan uangnya hanya untuk satu kebutuhan tanpa mempertimbangkan adanya kebutuhan-kebutuhan lain yang bisa saja datang sewaktu-waktu. *Ketiga*, pada ranah sosial, kemiskinan kultural

ditandai dengan (1) perasaan termarginalkan; (2) resisten terhadap pemberdayaan; dan (3) kerumunan kontra produktif.

Fenomena ini terlihat dari penelusuran awal pada beberapa wilayah yang menurut data statistik jumlah penduduk miskinnya terbanyak di Kabupaten Karangasem sebagai berikut.

*Pertama*, adanya pandangan hidup atau nilai-nilai yang berkembang dan potensial mendorong masyarakat terpuruk dalam kemiskinan. Pandangan hidup atau nilai-nilai tersebut, antara lain “*sampun nasibe lacur, masih mati sing ngaba kesugihan, diapin sugih diapin lacur masih kompor meragatang, diapin sugih sing karwan maan suargan*”. Terjemahannya “miskin itu sudah takdir, toh juga mati tidak membawa kekayaan, walaupun kaya atau miskin pada saat mati juga sama-sama dibakar, walaupun kaya tidak ada jaminan mendapat surga”. Dari semua itu tersirat makna bahwa kekayaan materi tidak penting dalam kehidupan ini. Aspek nilai atau cara berpikir seperti ini cenderung menimbulkan sikap pasrah menerima takdir, selalu berorientasi pada masa lalu dan tidak memiliki progres ke masa depan.

*Kedua*, mental penduduk miskin untuk mendapatkan uang secara instan menyebabkan kegagalan dalam berbagai upaya pemberdayaan penduduk miskin yang dilaksanakan oleh pemerintah. Misalnya, pemberian bantuan bibit babi dan sapi kepada penduduk miskin untuk diberdayakan kerap tidak berhasil karena lebih banyak yang dijual daripada dipelihara dan dikembangbiakkan. Uang hasil penjualan bantuan tersebut juga tidak diarahkan untuk aktivitas lain yang produktif, tetapi cenderung konsumtif.

*Ketiga*, mental penduduk miskin yang ingin mempertahankan kondisi kemiskinannya untuk mendapatkan asupan program pengentasan kemiskinan yang diberikan pemerintah, seperti bantuan bedah rumah, bantuan kelompok usaha bersama (kubek) pedesaan, bantuan kelompok usaha bersama (kubek) perkotaan, bantuan peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan masyarakat, bantuan program sistem pertanian terintegrasi (simantri), bantuan langsung tunai (BLT), bantuan beras miskin (raskin), program kredit usaha rakyat (KUR), program jaminan kredit daerah (jamkrida), dan sebagainya. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan data Dinas Sosial Kabupaten Karangasem bahwa jumlah penduduk miskin cenderung meningkat setelah pemerintah menggulirkan program bantuan langsung tunai. Artinya, program pemerintah yang bertujuan menjadikan penduduk miskin semakin berdaya, ternyata malah membuat penduduk miskin semakin manja dan ketergantungan.

*Keempat*, adanya sikap fatalis/malas, apatis/cuek, dan pragmatis/ingin instan atau ingin mendapatkan sesuatu dengan mudah dan cepat; aktivitas keagamaan kolektif dengan durasi panjang, misalnya saat *karya* di *kahyangan desa* sering kali tidak dikelola dengan manajemen tenaga, biaya, dan waktu yang proporsional. Aktivitas ini membuat warga miskin kehilangan kesempatan untuk bekerja karena harus terlibat secara penuh di dalamnya. Di sela-sela aktivitas tersebut juga tidak jarang disertai dengan aktivitas perjudian khususnya *tajen* pada siang hari dan permainan kartu (ceki) pada malam hari. Artinya, sangat banyak waktu dan uang yang dihabiskan oleh penduduk miskin selama mengikuti aktivitas tersebut selain itu, pada saat bersamaan mereka tidak memiliki

pemasukan. Fenomena ini ditemukan di seluruh wilayah kecamatan se-Kabupaten Karangasem.

*Kelima*, banyak penduduk miskin yang memilih menjadi gelandangan dan pengemis (gepeng) dengan melibatkan perempuan dan anak-anak di bawah umur sebagai mata pencaharian. Sebaliknya, justru pihak laki-laki banyak yang tidak bekerja, gemar minum minuman keras, dan berjudi. Malahan tidak jarang para gepeng tersebut memengaruhi warga lain yang telah bekerja untuk ikut menjadi gepeng dengan cara membandingkan penghasilan yang didapatkan. Fenomena ini ditemukan di seluruh wilayah Kecamatan Kubu terutama di Desa *Pakraman* Munti Gunung dan Desa *Pakraman* Pedahan. Persoalan gepeng dari Kabupaten Karangasem ini telah menjadi masalah sosial di Kabupaten Karangasem dan dampaknya turut menyebar ke kabupaten/kota lainnya di Bali dari tahun ke tahun. Bahkan, Kabupaten Karangasem dikatakan sebagai kabupaten pemasok gepeng di Bali.

Kelima indikasi di atas menunjukkan bahwa kemiskinan kultural di Kabupaten Karangasem merupakan fenomena yang menarik dikaji. Terkait dengan kemiskinan kultural, Suparlan (1988:xviii) juga menyatakan bahwa kemiskinan kultural dan budaya kemiskinan sulit dipisahkan ketika orang-orang miskin melestarikan subbudaya (kebiasaan-kebiasaan) yang membuat mereka nyaman berada dalam kondisi kemiskinan itu. Tradisi yang memberikan kontribusi terhadap kemiskinan pada masyarakat, bahkan mengakibatkan budaya kemiskinan diwariskan kepada generasi berikutnya secara turun-temurun.

Pendapat di atas menunjukkan bahwa kemiskinan muncul dari dalam diri orang miskin itu sendiri karena melestarikan kebiasaan telah menyebabkan

mereka semakin sulit keluar dari kondisi kemiskinan yang dihadapi. Hal ini tidak jarang berdampak pada maraknya terjadi kekerasan fisik dan konflik-konflik sosial yang lebih luas. Kekerasan seolah-olah menjadi jalan keluar dan tindakan itu dipandang sebagai tindakan yang sah untuk dilakukan. Semua itu terjadi karena situasi kemiskinan yang dihadapi seolah-oleh mengesahkan mereka untuk melakukan tindakan kekerasan. Tindakan kekerasan, kriminalitas, dan konflik sosial menunjukkan adanya ketidakmampuan mereka dalam berpikir konseptual dan kecenderungan yang sangat kuat dalam menggunakan reaksi motorik dalam mengatasi kekecewaan dan kegagalan hidupnya. Akumulasi kegagalan dan kekecewaan membuat mereka tidak dapat mempertimbangkan benar atau salah tindakan yang dilakukan (Lewis, 1974).

Uraian di atas menegaskan bahwa kemiskinan kultural dalam kehidupan warga miskin beragama Hindu di Kabupaten Karangasem merupakan fenomena sosiokultural dan keagamaan yang menarik dikaji. Mengingat fenomena ini seperti mata rantai yang sulit diputus, terwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, memperlambat upaya penanggulangan kemiskinan, serta dapat memberikan dampak negatif dalam kehidupan sosial yang lebih luas. Melalui penelitian ini fenomena kemiskinan kultural tersebut hendak diungkap melalui pendekatan agama dan kebudayaan sehingga dapat melahirkan sebuah kajian ilmiah yang bermanfaat, baik secara teoretis maupun praktis.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini memfokuskan kajiannya pada permasalahan yang dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut.

- (1) Mengapakah terjadi kemiskinan kultural dalam kehidupan warga miskin beragama Hindu di Kabupaten Karangasem?
- (2) Bagaimanakah bentuk kemiskinan kultural dalam kehidupan warga miskin beragama Hindu di Kabupaten Karangasem?
- (3) Apakah implikasi kemiskinan kultural dalam kehidupan warga miskin beragama Hindu terhadap agama dan kebudayaan Hindu di Kabupaten Karangasem?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian bertujuan untuk menciptakan dan/atau mengembangkan ilmu pengetahuan sebagai alat untuk memecahkan masalah secara ilmiah. Penciptaan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang dilakukan melalui penelitian diarahkan untuk memperoleh jawaban atau penjelasan mengenai gejala yang diamati (Afifudin dan Saebani, 2009:36). Berdasarkan pendapat tersebut, tujuan umum dan tujuan khusus dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fakta-fakta tentang kemiskinan kultural dalam kehidupan warga miskin beragama Hindu di Kabupaten Karangasem secara holistik dan komprehensif. Dalam hal ini kemiskinan kultural sebagai fenomena sosial juga melibatkan aspek-aspek agama

dan kebudayaan secara interrelasional. Adapun lingkup pengungkapannya dapat disimak pada tujuan khusus penelitian berikut ini.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga masalah yang telah dirumuskan di atas yaitu, sebagai berikut

- (1) Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan memperoleh pemahaman penyebab terjadinya kemiskinan kultural dalam kehidupan warga miskin beragama Hindu di Kabupaten Karangasem.
- (2) Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan memperoleh pengetahuan tentang bentuk kemiskinan kultural dalam kehidupan warga miskin beragama Hindu di Kabupaten Karangasem.
- (3) Untuk memperoleh pemahaman secara mendalam tentang implikasi kemiskinan kultural dalam kehidupan warga miskin beragama Hindu terhadap agama dan kebudayaan Hindu di Kabupaten Karangasem.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian terutama adalah kontribusinya bagi berbagai jenis kepentingan, baik pengembangan ilmu pengetahuan maupun kehidupan praksis manusia (Afifudin dan Saebani, 2009:36). Berdasarkan pendapat tersebut, manfaat penelitian ini dapat dibedakan menjadi manfaat teoretis dan praktis sebagai berikut.

### 1.4.1 Manfaat Teoretis

Penelitian pada dasarnya adalah aktivitas mengumpulkan fakta-fakta, yaitu proposisi-proposisi logis yang didukung data empiris. Jalinan fakta-fakta yang dikonstruksi secara jelas (*meaningfull construct*) inilah yang disebut teori. Adapun manfaat teoretis penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

*Pertama*, penelitian ini bermanfaat dalam pengembangan ilmu agama dan kebudayaan terutama memberikan kejelasan tentang konsep, proposisi, maupun teori mengenai kemiskinan kultural yang terjadi di Kabupaten Karangasem. *Kedua*, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai koreksi atau perbandingan atas hasil penelitian dan pemikiran teoretis terdahulu. *Ketiga*, penelitian ini bermanfaat sebagai klarifikasi atau penjelasan terhadap konsep, proposisi, dan teori yang telah ada sebelumnya berdasarkan data yang multivarian di lapangan.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi bagi berbagai pihak yang terkait dengan kemiskinan kultural dalam kehidupan warga miskin beragama Hindu di Kabupaten Karangasem. Informasi tersebut kiranya dapat dijadikan reflektivitas, rujukan, dan pertimbangan etik dalam kehidupan praktis sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya masing-masing, sebagai berikut.

- (1) Manfaat bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat menginspirasi lahirnya penelitian-penelitian berikutnya, baik pada aspek formal



maupun material sehingga memperkaya referensi ilmiah dalam khazanah ilmu agama dan kebudayaan.

- (2) Manfaat bagi lembaga-lembaga keagamaan Hindu di Kabupaten Karangasem, hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan etis dalam rangka penataan kelembagaan, hubungan antarinstansi keagamaan, serta pembinaan dan pemberdayaan umat Hindu di Kabupaten Karangasem. Dengan demikian, segala potensi dan sumber daya yang dimiliki umat Hindu Kabupaten Karangasem dapat dioptimalkan untuk membangun kesejahteraan.
- (3) Manfaat bagi umat Hindu di Kabupaten Karangasem, hasil penelitian ini dapat dijadikan reflektivitas atas pelaksanaan tradisi, budaya, dan keagamaan selama ini. Dengan mengenali berbagai kondisi dan potensi yang dimiliki, kiranya reflektivitas tersebut dapat dijadikan acuan dan pijakan untuk membangun kehidupan sehari-hari yang damai, sejahtera, dan bahagia.
- (4) Manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Karangasem, hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan etik dalam pengambilan kebijakan terkait dengan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Karangasem sehingga predikat Karangasem sebagai kabupaten termiskin tidak lagi disandang ke depannya.